

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual adalah bagian dari laporan hasil penelitian dan berisi berbagai konsep teori yang relevan dengan tema penelitian. Deskripsi konseptual harus benar dan lengkap, karena akan menjadi landasan penelitian.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah sebuah konsep dalam ekonomi dan manajemen yang mempelajari hubungan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam suatu perusahaan, yaitu pemilik (prinsipal) dan agen (manajer). Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Profesor Michael C. Jensen dan Profesor William H. Meckling dalam sebuah makalah berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*" yang diterbitkan pada tahun 1976 (Jensen & Meckling, 1976). Mereka menyebutkan bahwa *principal* dapat mengawasi agen dengan memberikan insentif yang dapat memotivasi agen dalam melaksanakan tugasnya yang bertujuan untuk menghindari konflik yang bisa terjadi.

Pemberian insentif kepada manajemen dapat menimbulkan adanya biaya agensi yang menjadi tanggungjawab dewan direksi untuk mengatasi bagaimana cara untuk meminimalkan biaya yang ditimbulkan (Ramadhani & Utomo, 2023). Perspektif teori keagenan mengharapkan agar kinerja perusahaan bisa meminimalisasi biaya dan meningkatkan efisiensi. Teori keagenan dan *Corporate Governance* saling terkait karena prinsip *Corporate Governance* menyatakan

bahwa manajer dan agen akan memberikan manfaat dari penerapan prinsip tersebut, serta manajer tidak akan menginvestasikan dana yang sudah diberikan oleh investor ke dalam proyek yang tidak akan menghasilkan keuntungan (Fadhilla et al., 2023).

Dengan menerapkan teori agensi, sistem tata kelola perusahaan yang baik memastikan adanya pengawasan terhadap cara manajemen menetapkan kebijakan serta memastikan bahwa para manajer mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Demikian pula, pemegang saham ingin melindungi dana yang telah mereka investasikan di perusahaan, sehingga tata kelola perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan itu sendiri. Dengan mengawasi para agen melalui tata kelola perusahaan, diharapkan sengketa antar pihak dapat diminimalkan. Sistem tata kelola perusahaan yang baik dapat melindungi perusahaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang sukses dan berkelanjutan (Qurniasih et al., 2025).

Pendapat disampaikan oleh Chen et al., (2021) menjelaskan bahwa teori ini telah cukup matang untuk menjelaskan penerapan mekanisme tata kelola perusahaan, hak kepemilikan, serta kinerja perusahaan dan organisasi. Tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan informasi terkait keberlanjutan, seperti ESG, bertujuan untuk memberikan kejelasan dan akuntabilitas bagi perusahaan terkait kinerja keberlanjutan mereka serta cara mereka memitigasi risiko, sehingga memastikan bahwa mereka bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan.

2.1.2 *Environmental, Social, and Governance (ESG)*

Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah suatu sistem yang terorganisir untuk menilai seberapa efektif suatu perusahaan memenuhi kewajiban mereka terkait isu-isu lingkungan, sosial, dan manajerial (Suripno, 2025). Aspek *Environmental* (Lingkungan) merupakan unsur penting bagi perusahaan dalam mencapai hasil keuangan dan operasional terbaik, sambil menjaga keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan. Aspek *Social* (Sosial) berfokus pada pengembangan interaksi yang baik antara perusahaan dan masyarakat, termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Disisi lain, aspek *Governance* (Tata Kelola) mencakup kapasitas dan legitimasi perusahaan, hubungannya dengan sistem pengendalian internal, hak pemegang saham, dan sistem pengawasan (Rokhaniyah et al., 2025).

ESG digunakan oleh investor, regulator, dan masyarakat untuk mengukur kinerja berkelanjutan suatu perusahaan di luar aspek keuangan. (Anindyastri & Risfandy, 2025). ESG merupakan kriteria yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan investasi. Hal ini mencakup penggabungan dan penerapan kebijakan perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, serta tata kelola yang baik (Zarkasih et al., 2024). Pengungkapan ESG yang baik bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga alat strategis untuk menjaga reputasi perusahaan dan memastikan operasinya tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan semakin menekankan upaya untuk meningkatkan dan mempublikasikan peringkat ESG mereka. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, perusahaan-perusahaan semakin menekankan

upaya untuk meningkatkan dan mempublikasikan skor ESG mereka. Pengungkapan ESG yang efektif dapat membuat perusahaan tampak lebih transparan dan akuntabel di mata investor dan masyarakat (Febriantoko et al., 2025).

Pengukuran ESG berdasarkan tingkat pengungkapan yang dilakukan berdasarkan GRI Standards 2021 yang terdiri atas aspek *Governance*, *Environmental*, dan *Social*. Struktur pengukuran mengintegrasikan total 97 indikator yang diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama korporasi, yaitu aspek tata kelola (*Governance*) sebanyak 30 indikator yang diidentifikasi melalui klausul universal *GRI 2: General Disclosures*, aspek lingkungan (*Environmental*) sebanyak 31 indikator dari *GRI 300 Series*, serta aspek sosial (*Social*) sebanyak 36 indikator dari *GRI 400 Series*. Tingkat pengungkapan atas akumulasi indikator tersebut dievaluasi melalui metode *content analysis* guna mengidentifikasi keberadaan muatan informasi non-keuangan di dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan (Nisa et al., 2023).

Secara metodologis, *content analysis* tersebut dieksekusi melalui pendekatan indeks pengungkapan tanpa bobot (*unweighted disclosure index*) untuk mengeliminasi bias subjektivitas peneliti serta menjamin objektivitas karena memperlakukan setiap item indikator sebagai entitas dengan bobot kepentingan yang setara (Abhishek et al., 2024). Penilaian terhadap instrumen indikator dilakukan menggunakan skala dikotomi (*dichotomous approach*) berbasis sistem biner yang direpresentasikan melalui penggunaan variabel *dummy* (*dummy variable*). Melalui sistem koding ini, skor 1 dialokasikan apabila kriteria kehadiran substansi informasi

materiil (*existence of material substance*) terpenuhi, sedangkan skor 0 merepresentasikan ketiadaan total (*non-disclosure*) atas muatan informasi terkait (Ika et al., 2022).

Mengantisipasi deviasi format pelaporan korporasi pada tahun transisi standar GRI 2021, penelitian ini mengadopsi pendekatan dikotomi yang dimodifikasi (*modified dichotomous approach*) dalam penentuan skor variabel *dummy*. Melalui orientasi metodologis ini, atribusi skor *dummy* 1 pada indikator universal *GRI Standards 2021* tidak mensyaratkan signifikansi pengungkapan seluruh klausul sub-rujukan *GRI Standards 2016* secara akumulatif. Sepanjang esensi informasi utama dari indikator baru tersebut telah direpresentasikan dalam laporan korporasi, maka ambang batas *existence of substance* dinyatakan terpenuhi sehingga skor *dummy* 1 tetap dideklarasikan. Rekonstruksi indeks berbasis substansi materiil pada masa transisi regulasi ini dinilai lebih adaptif (*more suitable*) dibandingkan pendekatan dikotomi kaku, serta konsisten dengan konsensus empiris pengukuran transparansi non-keuangan korporasi di Indonesia (Oehoedoe et al., 2023). Pendekatan ini digunakan untuk menjaga konsistensi pengukuran ESG selama periode penelitian 2021–2024 serta meminimalkan bias pengukuran yang dapat timbul akibat perbedaan standar pelaporan yang digunakan perusahaan pada masa transisi dari *GRI Standards 2016* ke *GRI Standards 2021*. Menurut (Aprilina et al., 2025) rumus untuk menghitung indeks ESG dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$\text{ESG Disclosure} = \frac{\text{Nilai Total Pengungkapan ESG}}{\text{Total Pengungkapan Maksimal}}$
--

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lain, yaitu milik perusahaan atau lembaga lainnya (Rustan, 2023). Lembaga atau institusi ini bisa berupa institusi pemerintahan, perusahaan swasta, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri (Irawati, 2022). Lembaga atau institusi tersebut memiliki bagian kepemilikan dalam sebuah perusahaan (Christin, 2020). Kepemilikan Institusional adalah suatu aspek yang memungkinkan pengawasan terhadap perusahaan, di mana persentase kepemilikannya yang signifikan, yaitu di atas 5%, menandakan potensi untuk mengawasi perusahaan besar (Monalisa, 2024).

Kepemilikan institusional dianggap lebih mampu memantau perilaku manajemen dibandingkan dengan investor individu. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa investor institusional adalah investor yang memiliki pengalaman yang luas (Tambunan & Wahyuliza, 2024). Keberadaan institusional dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan yang efektif untuk dunia bisnis. Kepemilikan institusional memiliki manfaat, seperti kemampuan untuk menganalisis data secara profesional dan menilai tingkat keandalannya. Dengan adanya kepemilikan institusi yang besar, hal ini dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat oleh investor institusional, sehingga dapat mencegah tindakan oportunistik dari manajer dan mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen yang dapat merugikan perusahaan (Sulistyandari et al., 2024).

Pengawasan tersebut dapat mengoptimalkan kinerja manajemen perusahaan, pengawasan ini tentunya akan memastikan kesejahteraan bagi para

pemegang saham, di mana peran kepemilikan institusi sebagai pengawas diperkuat oleh investasi yang signifikan mereka di pasar modal (Irawan et al., 2025). Kepemilikan saham oleh lembaga bisa mengurangi konflik kepentingan dalam suatu perusahaan. Apabila para pemegang saham memiliki pemahaman dan pengalaman di dunia bisnis serta keuangan, pengawasan akan berjalan lebih efisien (Irawan et al., 2025). Menurut Rustan, (2023) rumus untuk menghitung Kepemilikan Institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham milik institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

2.1.4 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran Dewan Direksi berkaitan dengan jumlah individu yang tergabung dalam dewan direksi suatu perusahaan. Ini merupakan elemen krusial dalam pengelolaan perusahaan karena berdampak pada efisiensi proses pengambilan keputusan, interaksi antar anggota, dan pengawasan terhadap manajemen (Tricker, 2015). Dewan direksi memiliki peran penting dalam menetapkan arah kebijakan perusahaan, baik untuk jangka waktu yang lama maupun pendek, dan juga bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan. Di samping itu, dewan direksi berfungsi sebagai wakil perusahaan baik di dalam maupun di luar organisasi. Jumlah anggota yang banyak meningkatkan hubungan dengan pihak luar perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja perusahaan (Yuliyanti et al., 2023).

Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kinerja perusahaan, mendistribusikan sumber daya, dan meningkatkan nilai bagi pemegang

saham. Tugas direksi adalah secara menyeluruh memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan (Fani Adhalia Rista et al., 2025). Ukuran dewan direksi harus disesuaikan secara optimal dengan ukuran, struktur, dan fungsi dari perusahaan yang terdaftar di pasar saham (Kamarudin et al., 2025). Peningkatan jumlah anggota dewan direksi perusahaan dapat memperluas variasi dalam keterampilan dan sudut pandang serta berpotensi menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam isu-isu keberlanjutan perusahaan (Regina & Agustina, 2025).

Banyaknya anggota direksi mencerminkan keragaman asal dan pemahaman, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas dalam proses pengambilan keputusan, salah satunya yang berhubungan dengan pengungkapan informasi perusahaan (Kevin Nicholas Sirait, 2024). Oleh karena itu dengan banyaknya jumlah anggota dewan direksi di dalam perusahaan, maka kompetensi yang terwujud untuk mencapai pengelolaan perusahaan yang baik juga akan semakin meningkat. Dengan bertambahnya jumlah anggota dewan direksi, tingkat persaingan antar anggota akan meningkat, sehingga harapan untuk perbaikan pengelolaan perusahaan juga akan semakin besar. Menurut Sudarmanto et al., (2021) rumus dalam menentukan ukuran dewan direksi yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$\sum \text{ Dewan Direksi dalam Perusahaan}$$

2.1.5 *Diversitas gender*

Menurut Suharjuddin, (2020) *Gender* adalah perilaku yang berbeda (perbedaan tingkah laku) antara pria dan wanita yang dibentuk secara sosial, yaitu

perbedaan yang bukan berasal dari ketentuan Tuhan tetapi dihasilkan oleh manusia melalui proses sosial dan budaya yang berkepanjangan. *Diversitas gender* adalah perbedaan jenis kelamin dalam susunan manajemen teratas, di mana kelompok yang memiliki beragam pengetahuan cenderung lebih kaya akan wawasan dan pengalaman, memungkinkan mereka untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, mereka dapat lebih mendalam dalam mempertimbangkan dan berargumen mengenai usulan, serta menciptakan solusi yang lebih baik dan inovatif (Risanti et al., 2024).

Gender merupakan atribut yang dimiliki oleh pria dan wanita, yang terbentuk melalui aspek sosial dan budaya. Perubahan dalam karakteristik dan atribut tersebut dari waktu ke waktu serta antar lokasi disebut sebagai konsep *gender* (Sastrawati, 2018). Keberagaman *gender* di dalam susunan dewan direksi sangat krusial untuk kelangsungan perusahaan yang telah mapan. Hal ini akan terus menjadi agenda utama dalam menyelesaikan isu tata kelola di masa yang akan datang (Hidayah, Nugroho, et al., 2023). Nilai-nilai berbeda yang ada di antara kedua jenis kelamin dapat saling berinteraksi dan melengkapi, dengan harapan dapat meminimalisir dampak dari tekanan luar sehingga praktik berkelanjutan yang efektif dapat tercapai. Keragaman *gender* di dalam jajaran pimpinan memungkinkan perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih baik (Irfan & Sarumpaet, 2023).

Susunan direksi perusahaan dalam hal keanekaragaman *gender* adalah faktor penting untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara direktur perempuan dan laki-laki dalam aspek kepribadian,

cara berkomunikasi, gaya kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial (Regina & Agustina, 2025). Perempuan biasanya lebih mengandalkan insting dalam pengambilan keputusan, memiliki kemampuan multitasking yang lebih baik, serta lebih terampil dalam membangun relasi. Sementara itu, laki-laki cenderung lebih fokus pada tugas tertentu dan membuat keputusan berdasarkan data dan prosedur yang tersedia (Dapingga & Romli, 2024). Keberadaan dewan yang mencakup perempuan serta keberagaman lainnya dapat mendorong inovasi dan meningkatkan citra perusahaan, serta menyajikan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis (Juniarti & Jie, 2024). Rumus dalam penelitian ini sama dengan penggunaan dari penelitian sebelumnya dari Kevin Nicholas Sirait, (2024) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Diversitas gender} = \frac{\text{Total direksi perempuan}}{\text{Total dewan direksi}}$$

2.1.6 Proporsi Komisaris Independen

Menurut Suwandi Ng, (2024) orang yang berasal dari luar perusahaan dan menjabat sebagai komisaris serta tidak memiliki kontribusi finansial yang signifikan terhadap pihak terkait perusahaan disebut sebagai komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari kalangan pemegang saham perusahaan, serta tidak terlibat dalam hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara mandiri atau hanya untuk kepentingan perusahaan (Novriyani, 2024). Para anggota dewan komisaris tidak boleh memiliki kaitan finansial, pengelolaan,

kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau perusahaan (A. Pratama et al., 2023).

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat melakukan pengawasan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, terutama yang berhubungan dengan kejujuran laporan keuangan (Damayanti et al., 2023). Anggota yang independen ini bersifat netral dan objektif dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris Independen memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan antara manajemen internal, sekaligus mengawasi kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen dan memberikan saran yang sesuai. Seperti halnya Direktur Utama, Dewan Komisaris Independen bertanggung jawab atas pencapaian efektivitas perusahaan, namun lebih menekankan pada dampak proses pengambilan keputusan daripada pengelolaan operasional (Margareth & Murti, 2024).

Komisaris independen juga berperan dalam memastikan perusahaan tetap bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan transparansi yang lebih kuat (Deniza et al., 2023). Sebagai perwakilan publik atau pemangku kepentingan di perusahaan, Dewan Komisaris Independen memainkan peran penting dalam mempromosikan pengungkapan informasi yang komprehensif. Oleh karena itu, memiliki lebih banyak komisaris independen akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan objektif demi melindungi kepentingan pemangku kepentingan, termasuk dengan menyediakan informasi yang lebih rinci (Fujianti et al., 2024). Proporsi ini penting dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk memastikan

keseimbangan kekuasaan dan transparansi. Menurut Yadnya, (2022) rumus untuk menghitung proporsi komisari independen sebagai berikut :

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total keseluruhan dewan komisaris}}$$

2.1.7 Ukuran Komite Audit

Ukuran Komite Audit mengacu pada jumlah anggota yang tergabung dalam komite audit suatu perusahaan. Komite Audit harus terdiri dari minimal 3 (tiga) anggota, yang terdiri dari komisaris independen dan pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan penerbit atau perusahaan terbuka (OJK, 2015). Hal ini menunjukkan adanya jumlah minimum yang harus dipenuhi agar fungsi Komite Audit dapat berjalan secara efektif. Di dalam POJK Nomor 55 Tahun 2015 juga diatur bahwa setidaknya terdapat 1 (satu) anggota dengan keahlian serta latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan dalam keanggotaan Komite Audit. Ini sangat terkait dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh Komite Audit untuk mengawasi aspek keuangan perusahaan (Kornelius & Djajadikerta, 2024).

Komite audit adalah bagian dari mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang bertugas mengevaluasi laporan audit keuangan perusahaan (Sifananda et al., 2024). Komite audit dibentuk dan dibubarkan oleh dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola laporan keuangan, kontrol internal, efektivitas auditor baik internal maupun eksternal, serta manajemen risiko karena komite audit mendukung fungsi dewan komisaris (Ressita et al., 2023). Komite audit memiliki peran penting dalam menjaga pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan serta pelaporan

keuangan yang berkualitas (Canovala et al., 2023). Dengan beroperasinya komite audit yang efisien, kontribusi yang signifikan dapat diberikan untuk memastikan bahwa proses pelaporan dan pengendalian internal, termasuk elemen yang berkaitan dengan ESG, berjalan dengan baik. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anggota komite audit dalam melaksanakan tugas pengawasan menjadi faktor kunci untuk menjaga agar perusahaan tetap mengikuti dan transparan dalam praktik ESG (Parker et al., 2021).

Kehadiran komite audit ini memberikan kepastian bahwa kinerja tanggung jawab perusahaan akan semakin baik. Selain itu, peran komite audit juga mencakup jaminan bahwa perusahaan menjalankan dan mematuhi semua regulasi yang ada, dengan mengawasi operasi bisnis yang dijalankan secara etis dan moral, sehingga mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih menyeluruh (Sakynah et al., 2023). Dengan adanya fungsi yang baik dari komite audit, kontrol terhadap perusahaan menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan peluang manajemen untuk bertindak dengan niat meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka (Canovala et al., 2023). Rumus dalam penelitian ini sama dengan penggunaan dari penelitian sebelumnya dari Kevin Nicholas Sirait, (2024) dengan rumus sebagai berikut :

$$\sum \text{Komite audit dalam perusahaan}$$

2.1.8 Jumlah Rapat Dewan Direksi

Rapat Direksi merupakan rapat resmi yang diselenggarakan oleh Dewan Direksi suatu perusahaan secara berkala selama tahun buku untuk membahas dan

menyetujui berbagai kebijakan serta langkah-langkah yang berlaku saat ini dan untuk masa yang akan datang (Finance, 2022). Rapat dewan direksi merupakan salah satu langkah yang diambil oleh dewan direksi untuk memastikan pengawasan terhadap manajemen. Rapat-rapat ini berfungsi sebagai sarana bagi para ahli untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi (Sari, 2025). Secara umum, dewan direksi berperan sebagai entitas yang mengawasi dan mengarahkan perusahaan, serta berkomunikasi dengan para pemegang saham dan investor melalui laporan tahunan, sambil menetapkan kebijakan bagi perusahaan (Sulistyo & Budi, 2023).

Meningkatnya jumlah pertemuan, frekuensi rapat dewan direksi dapat mengurangi risiko informasi yang tidak seimbang, sehingga peran dewan menjadi lebih efisien dan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sebagai bentuk akuntabilitas. Rapat dewan direksi dapat dilihat dari banyaknya pertemuan yang dilakukan dalam setahun. Secara umum, rapat-rapat dewan direksi berfungsi untuk mengembangkan strategi serta kebijakan perusahaan dan juga untuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum dan anggaran perusahaan telah dipatuhi (Rinaldy & Inawati, 2025). Dewan direksi yang sering mengadakan pertemuan cenderung lebih aktif dalam mengawasi manajemen, karena frekuensi rapat tersebut meningkatkan tekanan pada manajemen untuk memberikan informasi tambahan.

Frekuensi rapat yang tinggi, maka akan ada lebih banyak peluang untuk mendiskusikan isu-isu yang mungkin muncul, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan informasi tentang aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Sulistyo & Budi, 2023). Rapat dewan diartikan sebagai sarana pertukaran

informasi antara manajer dan investor, di mana umumnya pertemuan dewan memberikan kesempatan bagi anggota untuk berbagi lebih banyak informasi (Badiuzzamani et al., 2022). Pada penelitian ini jumlah rapat dewan direksi diukur dengan rumus yang telah dilakukan oleh Sulistyo & Budi, (2023) dengan rumus sebagai berikut :

$$\sum \text{Rapat dewan direksi selama satu tahun}$$

2.1.9 Variabel Kontrol

2.1.9.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan merujuk pada sejauh mana sebuah perusahaan dapat dianggap besar atau kecil (Damayanti et al., 2023). Kategori besar atau kecil suatu perusahaan ditentukan berdasarkan nilai aset yang dimiliki (Musa et al., 2023). Menurut Yeni et al., (2024), ukuran perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menilai skala sebuah perusahaan yang meliputi total aset dan total penjualannya. Dengan kata lain, ukuran perusahaan digunakan untuk menilai seberapa baik atau minimnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya, yang juga berpengaruh pada kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan dengan aset yang lebih besar memiliki dukungan modal yang lebih kuat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan investasi lebih besar serta menghadapi masalah finansial dengan lebih baik, sekaligus memperluas jangkauan dan pengaruhnya di sektor industri yang dimasukinya (Kartana et al., 2022).

Penentuan ukuran perusahaan memberikan pemahaman mengenai kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta bagaimana hal ini memengaruhi strategi dan kinerjanya (Salsabila & Yuliandhari, 2024). Ukuran yang besar pada sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan yang berkembang pesat dapat dengan mudah mengakses sumber daya karena posisinya yang kuat di pasar modal. Perusahaan besar cenderung lebih gampang memperoleh pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan besar biasanya mengalami perkembangan yang lebih signifikan dibandingkan dengan perusahaan kecil (Sephia et al., 2025). Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar dapat lebih gampang menarik dana dari luar, yang pada gilirannya membantu mereka meraih keuntungan maksimal demi meningkatkan nilai perusahaan (Sari et al., 2025).

Perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak pemangku kepentingan, sehingga keputusan mereka akan lebih berpengaruh terhadap masyarakat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan ukuran yang besar, perusahaan juga menjadi perhatian publik terkait kinerjanya, sehingga untuk menjaga reputasi yang baik, mereka berupaya melaksanakan tanggung jawab sosial dengan lebih baik (Indriyani & Sudaryati, 2020). Menurut Hartati, (2024) ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$$

2.1.9.2 Leverage

Leverage adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun

jangka panjang (Astuti et al., 2021). Menurut pendapat Kasmir, (2017), *Leverage* merupakan rasio yang dipakai untuk menilai sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang. Ini menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Dalam kegiatan operasional, perusahaan dapat mencari dana dari luar, salah satunya adalah dengan memanfaatkan utang. Penggunaan utang menguntungkan karena bisa mengurangi pajak yang harus dibayar. Dengan memanfaatkan utang, perusahaan dapat menambh sumber daya finansial, sehingga dapat memaksimalkan peluang bisnis yang ada (Lubis & Nugroho, 2023).

Perusahaan yang memiliki level *Leverage* tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan yang besar terhadap dana dari luar dalam mendanai aset-asetnya. Di sisi lain, perusahaan dengan level *Leverage* yang lebih rendah cenderung lebih fokus menggunakan modal internal untuk mendanai aset (Kartana et al., 2022). *Leverage* adalah isu krusial bagi setiap perusahaan, karena dampak dari utang yang diterima dapat langsung mempengaruhi keadaan keuangan sebuah perusahaan (Lubis & Nugroho, 2023). Jika suatu perusahaan memiliki utang yang berlebihan, hal ini akan sangat berisiko, karena perusahaan tersebut bisa masuk ke dalam kategori *Leverage* ekstrem, yaitu terjebak dalam beban utang yang tinggi dan sulit untuk keluar dari situasi tersebut (Gunawan et al., 2023).

Leverage juga bisa bermanfaat bagi perusahaan untuk menghindari kebangkrutan jika digunakan dengan baik, namun sebaliknya, jika dikelola dengan buruk, hal itu bisa berujung pada kebangkrutan karena perusahaan akan kesulitan dalam melunasi utang yang ada (Hidayah, Mulyanto, et al., 2023). Oleh karena itu,

penting bagi perusahaan untuk menyeimbangkan jumlah utang yang perlu diambil serta mencari sumber-sumber yang tepat untuk membayar utang tersebut. Pengelolaan utang yang tepat dapat meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai saham. Menurut Astuti et al., (2021) *Leverage* diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang (liabilitas)}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.9.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba (E. Setiawan, 2022). Menurut Darmawan, (2020), profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu serta mengindikasikan seberapa efektif manajemen dalam melaksanakan operasionalnya. Ketika profitabilitas meningkat, maka kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang tinggi akan terlihat, sehingga perusahaan tersebut dapat menunjukkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan keuangannya. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan mencerminkan perspektif positif tentang perusahaan. Semakin besar nilai profitabilitas yang dimiliki, semakin tinggi pula efisiensi perusahaan, yang pada gilirannya mencerminkan kinerja perusahaan yang baik (Christiawan & Andayani, 2023).

Profitabilitas memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah bisnis untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam waktu yang panjang, karena profitabilitas dapat menunjukkan apakah perusahaan itu memiliki prospek yang baik di masa depan atau justru sebaliknya (Febriyanti et al., 2025). Profitabilitas

memberikan keuntungan bagi perusahaan, seperti kemampuan untuk mengetahui seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dalam satu periode, serta membandingkan perkembangan posisi laba dari tahun lalu dengan tahun ini (Musa et al., 2023). Tingkat profitabilitas yang tetap akan menjadi acuan seberapa baik perusahaan dapat bertahan dalam usaha mereka. Para investor juga akan menghubungkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan tingkat risiko yang muncul dari investasi mereka (Rusvita, 2020). Menurut Astuti et al., (2021) profitabilitas diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini adalah:

Tabel 2. 1
Hasil Yang Relevan

No	Nama peneliti / Tahun penelitian	Variabel	Hasil
1	(Kevin Nicholas Sirait Fuad, 2024) Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG)	Y : <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Ukuran Dewan Direksi X3 : <i>Diversitas gender</i> X4 : Proporsi Komisaris Independen X5 : Ukuran Komite Audit	Hasil ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional menyebabkan penurunan pengungkapan ESG. Keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan pengungkapan ESG. Variabel lain, seperti jumlah anggota dewan direksi, <i>Diversitas gender</i> , dan ukuran komite audit, tidak berkontribusi terhadap peningkatan pengungkapan ESG.
2	(Rinzia Revy Restyasih, Dinda Anugrahenny	Y : <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG)	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki

No	Nama peneliti / Tahun penelitian	Variabel	Hasil
	Sanjaya Putri, Moh. Iqbal Wildan Irhamni, Rohmawati Kusumaningtyas, 2025) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan ESG Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2023-2024	X2 : Ukuran dewan direksi	dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan ESG. Artinya, semakin banyak anggota dewan direksi, semakin rendah cenderung tingkat pengungkapan ESG suatu perusahaan..
3	(Ni Wayan Diah Puspita Sari, 2025) Analisis Hubungan <i>Good Corporate Governance</i> dengan ESG Rating Perusahaan di Indonesia	Y : <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) X2 : Ukuran dewan direksi X6 : Jumlah rapat dewan direksi	Studi ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak secara signifikan memengaruhi peringkat ESG suatu perusahaan, begitu pula jumlah rapat dewan yang diadakan dalam setahun tidak memiliki dampak signifikan terhadap ESG rating.
4	(Hanung Desy Hapsari, Dianwicakasih Arieftiara, 2024) <i>The Effect of Audit Committee Size, Board Size, and Women on the Board on the Disclosure of Environment, Social, and Good Governance (ESG) Reports</i>	Y : <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) X5 : Ukuran komite audit	Dengan nilai probabilitas 0,263, ukuran Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran Komite Audit, semakin besar pula peluang untuk pengungkapan ESG.

No	Nama peneliti / Tahun penelitian	Variabel	Hasil
	<i>Before and During the COVID-19 Pandemic in Indonesian Mining Companies</i>		
5	(Ronia Tambunan, Suci Wahyuliza, 2024) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan ESG	Y : <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) X1 : Ukuran komite audit	Kepemilikan Institusional pengaruh terhadap pengungkapan ESG pada perusahaan yang terdaftar di BEI..

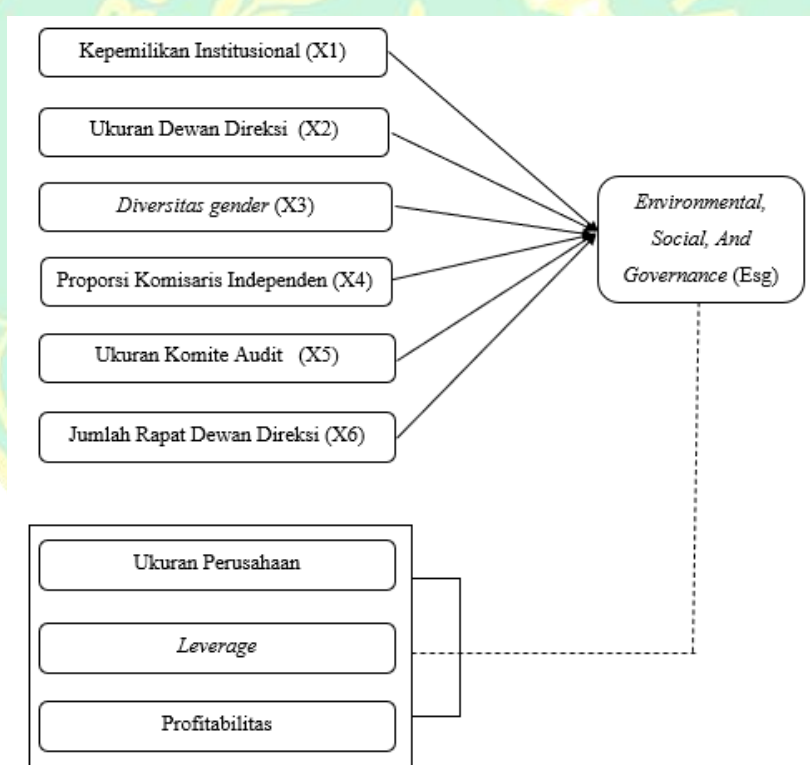
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan (Badriyah, 2023). Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan penelitian mengenai suatu hal yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, perlu menjelaskan sesuai dengan apa yang dimaksud peneliti dalam menggunakannya. Selain mengklarifikasi hubungan antar konsep, kerangka konseptual yang terdefinisi dengan baik juga berfungsi sebagai peta panduan bagi para peneliti sepanjang proses studi, memastikan bahwa penelitian mereka tetap fokus dan relevan.

Penelitian saat ini untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki pengaruh dan hubungan, yang mana variabel dependen yaitu *Environmental, Social, and Governance* (ESG), sedangkan independen yaitu *Corporate Governance* dengan kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, *diversitas gender*, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan jumlah rapat dewan direksi sebagai indikator guna pengukuran praktik *corporate governance*. Adapun kerangka konseptual yang digunakan untuk merumuskan suatu hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual



2.2 Definisi Operasional

Definisi variabel ini untuk menetapkan indikator dalam variabel yang akan di uji beserta bagaimana cara pengukuran dari variabel tersebut. Sehingga dalam pengujian hipotesis dapat di lakukan dengan tepat. Pada penelitian kali ini menggunakan Enam variabel independen dan dependen, yaitu :

Tabel 2. 2
Definisi Operasional

Variabel	Definsi Operasional	Indikator	Skala
Variabel Dependen			
<i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>	ESG diukur dengan perbandingan nitai total pengungkapan ESG terhadap total pengungkapan maksimal	$\text{ESG Disclosure} = \frac{\text{Nilai Total Pengungkapan ESG}}{\text{Total Pengungkapan Maksimal}}$ Sumber : (Aprilina et al., 2025)	Rasio
Variabel Independen			
Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional diukur dengan perbandingan saham milik instutusional terhadap total saham beredar.	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham milik institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$ Sumber : (Rustan, 2023)	Rasio
Ukuran Dewan Direksi	Ukuran Dewan direksi dalam penelitian ini dapat diukur dengan jumlah dewan direksi dalam perusahaan	$\sum \text{Dewan Direksi dalam Perusahaan}$ Sumber : (Sudarmanto et al., 2021)	Skala
<i>Diversitas gender</i>	<i>Diversitas gender</i> diukur		Rasio

Variabel	Definsi Operasional	Indikator	Skala
	dengan perbandingan total direksi perempuan terhadap total dewan direksi.	$\text{Diversitas gender} = \frac{\text{Total direksi perempuan}}{\text{Total dewan direksi}}$ Sumber : (Kevin Nicholas Sirait, 2024)	
Proporsi Komisaris Independen	Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan perbandingan total komisari independen terhadap total keseluruhan dewan komisaris	$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total keseluruhan dewan komisaris}}$ Sumber : (Yadnya, 2022)	Rasio
Ukuran Komite Audit	Ukuran komite audit dalam penelitian ini dapat diukur dengan jumlah komite audit dalam perusahaan	$\sum \text{Komite audit dalam perusahaan}$ Sumber : (Kevin Nicholas Sirait, 2024)	Skala
Jumlah rapat dewan direksi	Jumlah rapat dewan direksi dalam penelitian ini dapat diukur dengan jumlah rapat dewan direksi dalam satu tahun	$\sum \text{Rapat dewan direksi selama satu tahun}$ Sumber : (Sulistyo & Budi, 2023)	Skala
Variabel Kontrol			
Ukuran Perusahaan	Besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur menggunakan total aktiva atau besarnya harta	$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$ Ln = logaritma natural	Rasio

Variabel	Definsi Operasional	Indikator	Skala
	perusahaan dengan menggunakan nilai logaritma total aktiva	Sumber : (Hartati, 2024)	
<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> diukur dengan perbandingan total utang terhadap total aset	$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang (liabilitas)}}{\text{Total Aset}}$ Sumber : (Astuti et al., 2021)	Rasio
Profitabilitas	Profitabilitas diukur dengan perbandingan laba bersih terhadap total aset	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$ Sumber : (Astuti et al., 2021)	Rasio

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Kepemilikan Institusional merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga lainnya (Monalisa, 2024). Halaman tentang Kepemilikan Institusional berfungsi untuk memantau perusahaan yang memiliki persentase Kepemilikan Institusional tinggi, yaitu lebih dari 5%, yang menunjukkan kemampuan untuk mengawasi perusahaan berskala besar. Peran dari Kepemilikan Institusional dalam pengawasan manajemen sangat krusial karena mereka mendorong pengawasan yang lebih efisien dan memastikan kesejahteraan bagi pemegang saham. Dampak mereka sebagai pengawas diperkuat oleh investasi yang signifikan di pasar modal (Haryani & Susilawati, 2023).

Berdasarkan sudut pandang teori agensi, kepemilikan oleh lembaga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi masalah agensi dengan meningkatkan pengawasan yang lebih baik, seiring peningkatan jumlah investor institusional (Maulana & Widyawati, 2024). Menurut Ellili, (2023), para investor institusi saat ini tidak hanya memusatkan perhatian pada kinerja finansial, tetapi juga pada cara perusahaan menjalankan bisnis yang mengutamakan kepentingan para pemangku kepentingan, sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan, seperti ESG untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan & Wahyuliza, (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh pada pengungkapan ESG di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya dominasi dan kekuatan institusi yang signifikan, yang dapat memengaruhi kebijakan, termasuk pengungkapan mengenai keberlanjutan ESG. Kepemilikan institusional ini memperkuat kebutuhan untuk membagikan informasi guna mencapai tujuan keberlanjutan. Di samping itu, institusi menganggap transparansi informasi sebagai hal yang penting bagi para pemangku kepentingan agar tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efisien.

H1 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Pengungkapan ESG

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*

Dewan direksi berfungsi sebagai pengelola dan memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam manajemen perusahaan, dengan tugas yang mencakup penetapan arah strategis, pembuatan kebijakan operasional, dan memastikan

kesehatan manajerial perusahaan (Haryani & Susilawati, 2023). Komposisi dewan direksi selalu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan perusahaan, karena jumlah anggota dewan bisa berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dengan efektif. Dewan direksi juga memiliki peranan krusial dalam mengarahkan strategi perusahaan, membuat keputusan, dan mengelola sumber daya perusahaan (Regina & Agustina, 2025).

Menurut teori agensi, manajemen perusahaan, yang bertindak sebagai agen, harus membangun hubungan yang baik dengan pemilik perusahaan (prinsipal) dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu cara untuk membangun hubungan tersebut adalah melalui (Rahmawati et al., 2025). Ukuran dewan direksi dianggap memengaruhi sejauh mana suatu perusahaan mengungkapkan isu-isu ESG karena hal tersebut menentukan struktur dan komposisi dewan direksi, yang pada gilirannya memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldy & Inawati, (2025), menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG, yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan yang lebih banyak memperkuat peran serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsi mereka, termasuk pengawasan manajemen yang lebih efektif, pemberian arahan strategis, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

H2 : Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan ESG

2.3.3 Pengaruh *Diversitas gender* Terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Gender merupakan sekumpulan ciri-ciri yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang (R. Setiawan et al., 2025). Keragaman dalam dewan direksi adalah hasil dari berbagai sifat, karakter, dan keterampilan yang dimiliki oleh para anggotanya yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Ada perbedaan karakter antara perempuan dan laki-laki. Perempuan cenderung lebih berhati-hati, menghindari ketidakpastian, dan bersikap lebih teliti. Sementara itu, laki-laki lebih percaya diri dan lebih bersedia mengambil risiko dibandingkan perempuan.

Teori agensi adalah salah satu kerangka kerja utama dalam tata kelola perusahaan yang membahas model hubungan prinsipal dan agen. Teori ini mengemukakan bahwa terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen biasanya disebabkan oleh posisi informasi pemegang saham yang lebih rendah dibandingkan dengan eksekutif atau anggota dewan direksi. Dalam konteks ini, penunjukan perempuan dalam dewan direksi perusahaan dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan mengurangi masalah yang berkaitan dengan agensi (Babiker & Bakhit, 2025).

Kehadiran perempuan di dewan direksi berkontribusi pada peningkatan pengawasan, serta berbagai mekanisme melalui teori agensi dapat berujung pada peningkatan transparansi mengenai ESG (Cunningham & Ereddia, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Risanti et al., (2024) menunjukkan bahwa keberagaman gender berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Keberadaan perempuan di dalam perusahaan mendorong peningkatan detail dalam pengungkapan

terkait keberlanjutan, dan dapat memengaruhi keputusan dari perspektif yang berbeda.

H3 : *Diversitas gender* berpengaruh Terhadap Pengungkapan ESG

2.3.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Proporsi komisaris independen adalah rasio antara jumlah komisaris independen dan total anggota dewan komisaris perusahaan (R. Setiawan et al., 2023). Komisaris independen adalah individu yang berada di dewan komisaris tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen, anggota dewan lainnya, atau pemegang saham utama, serta tidak memiliki hubungan bisnis atau koneksi lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara mandiri atau demi kepentingan perusahaan (OJK, 2014).

Konsep ini sejalan dengan teori agensi, di mana komisaris independen berfungsi sebagai pihak netral yang bertugas mengawasi dan memberikan saran kepada manajer untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan (Margareth & Murti, 2024). Secara teoritis, proporsi komisaris independen berkaitan dengan teori keagenan; dari sudut pandang ini, semakin besar jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin baik mereka dapat bertindak mandiri saat terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Deniza et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Nicholas Sirait, (2024) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi ESG. Kehadiran komisaris independen diyakini dapat meningkatkan

efektivitas pemantauan terhadap perilaku manajer dan mengurangi tindakan oportunistik dengan mendorong pengungkapan yang lebih luas, termasuk informasi terkait ESG.

H4 : Proporsi komisaris independen berpengaruh Terhadap Pengungkapan ESG

2.3.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Komite audit adalah tangan kanan dewan komisaris ketika menjalankan pengawasan atas kinerja perusahaan (Sakynah et al., 2023). Komite audit yang memiliki tanggung jawab membantu dewan komisaris dalam menjalankan peran mereka sebagai pengawas dan pengelola risiko, serta bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan, menerapkan tata kelola perusahaan, serta berbagai hal lain yang menjadi perhatian dewan komisaris, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemilik (Fujianti et al., 2024).

Teori agensi menjelaskan bahwa keberadaan anggota komite audit yang signifikan dapat mendukung mekanisme pemantauan internal, terutama dalam mengungkap informasi yang lebih komprehensif (J. C. Pratama & Rohman, 2023). Ketika komite audit memiliki ukuran yang besar, hal ini menandakan bahwa komite tersebut terdiri dari individu-individu yang memiliki pengetahuan, latar belakang, keterampilan, dan perspektif yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemantauan (Fasha & Ratmono, 2022).

Penelitian yang dilakukan Gempita et al., (2023) menyatakan bahwa besar ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG. Ukuran

komite audit yang besar akan memengaruhi penyelesaian masalah yang mungkin muncul, khususnya dalam proses pengungkapan laporan keuangan dan non-keuangan (Josua & Septiani, 2020).

H5 : Ukuran Komite Audit Berpengaruh Terhadap Pengungkapan ESG

2.3.6 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Rapat dewan direksi adalah rapat berkala yang diadakan oleh para direktur untuk membahas kebijakan dan isu-isu penting yang dihadapi perusahaan. Fungsi Rapat dewan berfungsi sebagai forum untuk berbagi pengetahuan dan informasi di antara para ahli (Sari, 2025). Peran dewan semakin vital, terutama dalam situasi krisis, ketika kepentingan pemegang saham terancam. Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan bijak guna melindungi kepentingan pemegang saham, meskipun mereka dilindungi oleh aturan mengenai keputusan bisnis (Rinaldy & Inawati, 2025).

Berdasarkan pada teori agensi, dewan direksi yang sering mengadakan pertemuan saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, akan mendapatkan lebih banyak kontrol, serta meningkatkan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi (Faradea & Suwarno, 2022). Teori ini mengemukakan bahwa peningkatan jumlah pertemuan dapat mengurangi isu keagenan karena adanya interaksi ide, diskusi, dan pengungkapan kinerja perusahaan (Yakob & Hasan, 2021).

Penelitian Khairiddine & Aljabr, (2020) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan direksi memiliki pengaruh dalam meningkatkan pengungkapan ESG yang

dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi dan menyelesaikan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

H6 : Jumlah Rapat Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Pengungkapan ESG

